



Pemkab Selesaikan 86,46 Persen Rekomendasi BPK



Foto bersama BPK perwakilan Provinsi Kalbar bersama Bupati Landak dan inspektorat. ANTONIUS

Ngabang-RK. Badan Pemerik-
saan Keuangan (BPK) Perwakilan
Kalbar, Didi Budi Satrio, meny-
erahkan laporan hasil pantauan
tindak lanjut atas rekomendasi
hasil pemeriksaan dan laporan
hasil pemantauan kerugian dae-
rah semeter satu tahun 2015, di
aula kantor bupati Landak, Selasa
(22/9).

Penyerahan laporan tersebut
merupakan amanah pasal 23

E ayat (2) UUD 1945, pasal 18
ayat (1) Undang-undang nomor
15 tahun 2006, pasal 20 ayat (3)
undang-undang nomor 15 tahun
2004 menyatakan bahwa tindak
lanjut hasil pemeriksaan BPK
disampaikan oleh pejabat kepala
BPK selambat lambatnya enam
puluh hari setelah Laporan hasil
Pemantauan (LHP) di terima.

Apakah telah sesuai, belum
sesuai, belum di tindaklanjuti atau

tidak di lanjut dengan alasan yang
sah. "Penelaahan ini telah kami
laksanakan pada tanggal 10-14
Agustus 2015 lalu. Hasil dari pene-
laahan ini baru kami sampaikan
kepada DPRD dan eksekutif pada
hari ini (kemarin)," katanya.

Dikatakannya, alasan BPK men-
gundang pemerintah kabupaten/
kota Singkawang, Landak, Sambas,
dan Bengkayang atau yang me-
wakili dalam acara penyerahan

laporan hasil pemantauan TLRHP
dan laporan hasil pemantauan
kerugian negara/daerah, untuk
meningkatkan pemahaman dan
peran serta SKPD dalam per-
cepatan penyelesaian TLRHP dan
penyelesaian kerugian negara/
Daerah.

"Khusus untuk empat dae-
rah pemerintah daerah yang
telah kami serahkan laporan hasil
pemantauan TLRHP dan lapo-
ran hasil pemantauan kerugian
negara/daerah. Terdapat 2.011
rekomendasi atau sebesar 24,64
persen dari total keseluruhan
rekomendasi pada pemerintah
daerah di Kalbar," kata Didi.

Ia menerangkan, pemerintah
kabupaten Landak telah meny-
elesaikan 86,46 persen, tindak lan-
jut sesuai dengan rekomendasi.
12,71 persen tindak lanjut be-
lum sesuai dengan rekomendasi
dan sebanyak 0,83 persen reko-
mendasi belum di tindaklanjuti.
Kota Singkawang, 62,15 pers-
en tindak lanjut sesuai dengan

rekomendasi, 35,24 persen tin-
dak lanjut belum sesuai dengan
rekomendasi dan sebanyak 2,61
persen rekomendasi belum tindak
lanjut.

Pemerintah kabupaten Sambas
telah meyelesaikan 83,51 persen
tindak lanjut sesuai dengan reko-
mendasi, 13,92 persen belum
sesuai dengan rekomendasi dan
sebanyak 2,58 persen tindak lan-
jut belum di tindaklanjuti.

Dan pemerintah kabupaten
Bengkayang, telah menyelesaikan
49,25 persen tindak lanjut sesuai
dengan rekomendasi, 48,87 persen
tindak lanjut belum sesuai dengan
rekomendasi dan sebanyak 1,89
persen rekomendasi belum di
tindaklanjuti.

"Kami berharap kepada para ke-
pala daerah dapat terus berkomit-
men untuk terus meningkatkan
peyelesaian status rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK," ujarnya.

Reporter: Antonius
Editor: Kiram Akbar